I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian (Pratiwik dan Rahmayani, 2023). Sektor ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional karena memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), menyediakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan (Putri et al., 2023). Selain itu, sektor perkebunan memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional Indonesia, baik sebagai penggerak utama ekspor maupun sebagai sumber penghidupan salah satunya kelapa sawit yang banyak dimiliki oleh petani rakyat (Nurfatriani et al., 2019).

Salah satu wilayah dengan produksi kelapa sawit tertinggi yakni Provinsi Jambi. Menurut BPS Provinsi Jambi (2025) pada Tahun 2024 produksi kelapa sawit meningkat dari tahun 2023 sebesar 2.46 juta ton menjadi 2.47 juta ton dengan luas area tanam dan produktivitas tanaman kelapa sawit masing-masing sebesar 648.283 hektar dan 3,85 juta ton, (Lampiran 1). Terdapat tiga Kabupaten dengan produksi kelapa sawit tertinggi yakni Kabupaten Batanghari (591.521 ton), Kabupaten Muaro Jambi (435.484 ton) dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (328.427 ton) (Lampiran 2). Menurut BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2025) pada Tahun 2024 produksi kelapa sawit tertinggi dihasilkan dari 5 Kecamatan yakni Kecamatan Batang Asam (34.409 ton), Tebing Tinggi (32.598 ton), Muara Papalik (27.068 ton) dan Tungkal Ulu (25.304 ton) (Lampiran 3).

Pertumbuhan pesat pada sektor perkebunan kelapa sawit ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti penggundulan hutan, penurunan tingkat lingkungan, dan konflik sosial terkait tata kelola lahan. Perluasan lahan yang menyeluruh di beberapa wilayah Indonesia seringkali menimbulkan tekanan lingkungan yang berdampak pada keberlanjutan sumber daya

alam dan menurunkan kepercayaan pasar global terhadap produk minyak sawit Indonesia (Nainggolan et al., 2024). Dalam menghadapi situasi tersebut, diperlukan adanya sistem pengelolaan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan antara produktivitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, salah satunya melalui penerapan standar *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO).

Sertifikasi RSPO merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi minyak sawit dilakukan secara bertanggung jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Standar RSPO dibangun atas delapan prinsip dan kriteria yang meliputi kepatuhan terhadap hukum, praktik terbaik dalam budidaya, tanggung jawab lingkungan, transparansi, hingga kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan sertifikasi ini, pelaku usaha baik perusahaan besar maupun petani kecil didorong untuk menjalankan praktik perkebunan yang ramah lingkungan serta menghormati hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

Keberhasilan implementasi standar RSPO di tingkat petani tidak hanya ditentukan oleh dukungan kelembagaan dan teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dimensi psikologis petani, yakni persepsi dan perilaku mereka terhadap standar sertifikasi tersebut. Persepsi petani tentang manfaat relatif, kesesuaian dengan nilai-nilai lokal, kompleksitas persyaratan, serta kemungkinan untuk diuji coba merupakan faktor-faktor yang secara langsung berpengaruh terhadap motivasi dan keputusan petani dalam menerapkan praktik berkelanjutan (Denashurya et al., 2023). Hamdani et al (2025) melaporkan bahwa sebelum dilakukan pendampingan intensif, sebagian besar anggota koperasi belum memahami secara mendalam prinsip RSPO, terutama terkait pengelolaan limbah, dokumentasi praktik kebun, serta hak-hak pekerja, namun setelah pelatihan terstruktur, pemahaman petani meningkat signifikan dari 42 persen menjadi 85 persen. Hal ini menegaskan bahwa persepsi yang tepat dan perilaku positif petani merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan penerapan standar sertifikasi RSPO.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari sertifikasi RSPO di Indonesia. Hidayat et al. (2015) mengkaji tata kelola sertifikasi keberlanjutan pada petani kecil kelapa sawit Indonesia dari perspektif manajemen lingkungan. Penelitian lain berfokus pada strategi percepatan sertifikasi ISPO di Provinsi Riau (Hadi et al., 2023), serta analisis faktor-faktor yang memengaruhi motivasi petani sawit mandiri dalam implementasi kebijakan Kawasan Berbasis Komoditas (KBK) (Iskandar et al., 2024). Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara persepsi dan perilaku petani yang telah bersertifikat RSPO terhadap penerapan standar sertifikasi tersebut, sebagian besar penelitian dilakukan di Sumatera Utara, Riau, atau Kalimantan, sehingga minimnya kajian empiris yang berfokus pada konteks Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi dan penelitian pada kelompok petani yang sudah bersertifikat dan tergabung dalam asosiasi petani mandiri, seperti Perkumpulan Petani Mandali Jaya (PPMJ), masih sangat terbatas dibandingkan dengan penelitian pada petani yang belum atau sedang dalam proses sertifikasi. Pemahaman persepsi dan perilaku petani yang sudah bersertifikat sangat penting untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi standar, mengidentifikasi potensi permasalahan pemeliharaan sertifikasi, dan merumuskan strategi pembinaan yang lebih efektif ke depannya.

Asosiasi Perkumpulan Petani Mandali Jaya (PPMJ) adalah asosiasi beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi yang telah memperoleh sertifikasi RSPO dan menjadi contoh kebijakan praktik keberlanjutan di tingkat petani kecil. Namun, hingga saat ini efektifitas pelaksanaan kegiatan sertifikasi tersebut belum diketahui sejauh mana aplikasinya dan hal itu sangat terkait dengan persepsi dan perilaku petani dalam memahami, menerima dan mengimplementasikan standar RSPO tersebut dilapangan, petani saat ini masih fokus pada peningkatan produktivitas tanpa sepenuhnya memperhatikan prinsip keinginan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang ditetapkan dalam standar. Sehingga perlu dikaji

bagaimana kaitan antara persepsi dan perilaku petani terhadap penerapan RSPO yang mencerminkan tingkat pemahaman, penerimaan, dan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip sartifikasi RSPO. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **"Hubungan Persepsi dan Perilaku Terhadap Penerapan Standar *Sertifikasi Roundtable On Sustainable Palm Oil* (RSPO) di Asosiasi Perkumpulan Petani Mandali Jaya (PPMJ) Kabupaten Tanjung Jabung Barat".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran persepsi petani terhadap penerapan standar sertifikasi RSPO di di Asosiasi PPMJ Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
2. Bagaimana gambaran perilaku petani dalam penerapan standar sertifikasi RSPO di Asosiasi PPMJ Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?
3. Bagaimana hubungan antara persepsi dan perilaku petani terhadap penerapan standar sertifikat RSPO Asosiasi PPMJ Kabupaten Tanjung Jabung Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan persepsi petani terhadap penerapan sertifikasi RSPO di Asosiasi PPMJ Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Mendeskripsikan perilaku petani terhadap penerapan RSPO di Asosiasi PPMJ Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Menganalisis hubungan antara persepsi dan perilaku petani terhadap penerapan RSPO di Asosiasi PPMJ Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperluas wawasan, pemahaman, serta pengalaman ilmiah dalam bidang sosial ekonomi pertanian dan keberlanjutan.
2. Bagi peneliti, memberikan kontribusi pada literatur agribisnis dan sosiologi pedesaan mengenai perilaku adaptasi petani swadaya terhadap inovasi institusional dan standar kualitas internasional. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan mengenai keberlanjutan sektor kelapa sawit di tingkat mikro.
3. Bagi pemerintah, menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan fasilitasi sertifikasi, baik ISPO maupun RSPO, yang lebih humanis dan sesuai dengan kapasitas riil petani swadaya di Provinsi Jambi.
4. Bagi Petani, memberikan potret diri mengenai sejauh mana nilai-nilai keberlanjutan telah terinternalisasi di tingkat anggota. Informasi mengenai kendala, persepsi dan perilaku petani dapat digunakan sebagai dasar perbaikan sistem pendampingan dan komunikasi internal asosiasi.
5. Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya keberlanjutan dalam industri kelapa sawit, yang sering menjadi sorotan dalam isu lingkungan global.